

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN**

RENCANA KERJA TAHUN 2023



DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

JAKARTA, 2022

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan ini disusun sebagai pedoman penyusunan dokumen kegiatan dan anggaran lingkup Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja Tahun 2023 ini juga disusun berdasarkan Rancangan Kegiatan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024, Rancangan kegiatan Rencana Strategis Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2023, serta Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2023.

Rencana Kerja Tahun 2023 juga merupakan kerangka kerja bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk menjaga akuntabilitas kerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, sehingga diharapkan capaian kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dapat diwujudkan.

Ucapan Terimakasih disampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Jakarta, Desember 2022
Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hutan,



Krisdianto, S.Hut, M.Si, PhD
NIP. 19731001 199803 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Umum	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
Bab II Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	4
A. Capaian IKK Tahun 2021 dan Tahun 2022	4
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	5
Bab III Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.....	7
A. Strategi dalam mendukung program KLHK dan Program Prioritas Nasional	7
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2023.	7
Bab IV Penutup.....	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Kehutanan	2
Tabel 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	6
Tabel 3. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021	5
Tabel 4. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022	5
Tabel 5. Kegiatan Mendukung Program Prioritas Nasional	7
Tabel 6. Indikator Kinerja dan Unit Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	8
Tabel 7. Unit Kegiatan untuk Output NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	9
Tabel 8. Unit Kegiatan untuk Output Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan.....	10
Tabel 9. Unit Kegiatan untuk Output Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan .	11
Tabel 10. Unit Kegiatan untuk Output Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	12
Tabel 11. Unit Kegiatan untuk Output Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	12
Tabel 12. Unit Kegiatan untuk Output Pembinaan Teknis/Supervisi/Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	13

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dahulu Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) diberi amanah untuk melaksanakan "Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan". Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan tata kelola hutan produksi dalam rangka meningkatkan daya saing industri kehutanan.

Adapun sasaran program yang akan dicapai sesuai dengan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari;
2. Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil hutan serta penerimaan negara bukan pajak dari hutan produksi;
3. Meningkatnya produksi dan ragam produk hasil hutan (kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan); dan
4. Meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan.

Sebagai parameter keberhasilan dalam pencapaian sasaran, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dahulu Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Tahun 2020-2024, adalah :

1. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang menanam meningkat setiap tahun, meningkat menjadi 439 Unit selama 5 tahun;
2. Unit Usaha yang melakukan diversifikasi hasil hutan meningkat menjadi 7 Unit selama 5 tahun;
3. Produksi hasil hutan meningkat menjadi 60 juta m³ selama 5 Tahun;
4. Ekspor produk industri kehutanan meningkat sebesar US\$10,5 miliar pada tahun 2024;
5. Iuran kehutanan dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar Rp3,645 triliun pada tahun 2024;
6. Tata kelola hutan di tingkat tapak meningkat menjadi 150 Unit KPHP selama 5 tahun; dan
7. Akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi meningkat seluas 65.000 ha selama 5 tahun.

Berangkat dari sasaran program dan IKP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) tersebut diatas, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dahulu Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024, yang ditetapkan oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dengan mengacu pada

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan disusun untuk mendukung tercapainya sasaran program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan yaitu Peningkatan Usaha Industri Kehutanan untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan. Pada periode tahun 2022 telah dilakukan penyesuaian terkait dengan Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan ekspor produk olahan hasil hutan Tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan peningkatan usaha industri kehutanan tahun 2020-2024.

No	IKK	Satuan	Target Kinerja Kegiatan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	Juta M3	45	90	135	180	225	Target hingga 2024 sebanyak 225 juta M3
2.	UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK	UMKM	160	360	510	610	710	Target hingga 2024 sebanyak 710 UMKM
3.	Volume ekspor produk industri kehutanan	Juta Ton	15	30,5	46,5	63	80	Target hingga 2024 sebanyak 80 Juta Ton

Untuk memberikan kemudahan, petunjuk atau pedoman serta arahan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran lingkup Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil hutan telah menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun berjalan yang menjabarkan kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tetap memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berpedoman pada Renstra.

Berdasarkan RKP dan Pagu Anggaran serta Renja yang telah ditetapkan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja.

Dalam rangka mencapai strategi organisasi dan meningkatkan kinerja, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan juga telah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja/perjanjian kinerja. Penetapan perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan merupakan Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan memiliki fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan;

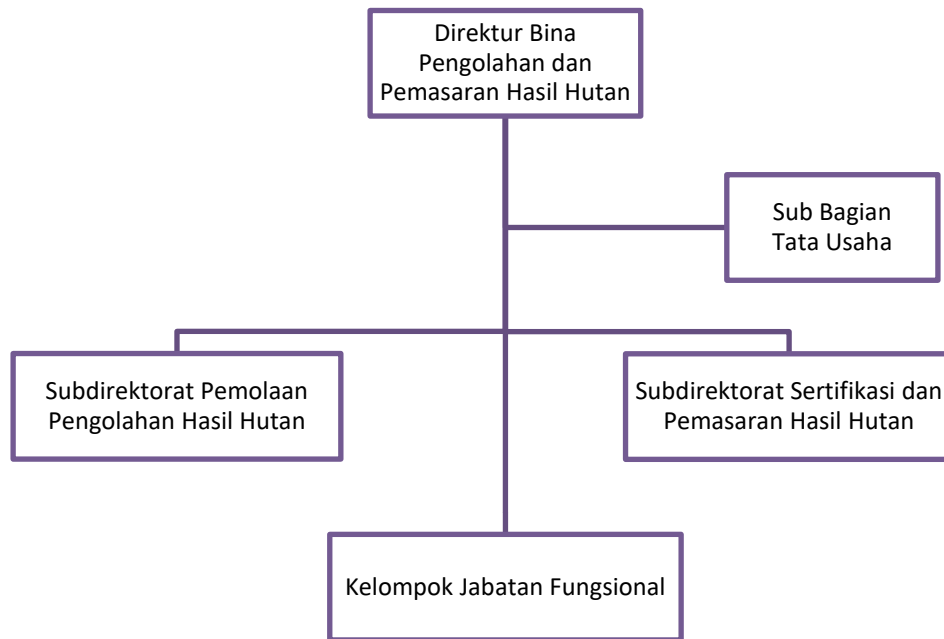
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan; dan
- 6) pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
- b. Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan;
- c. Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan;
- d. Sub bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat BPPHH

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut serta mendukung pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari khususnya dalam peningkatan nilai ekspor hasil hutan, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2023 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan agar sasaran Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2023 dapat tercapai secara optimal, efektif, dan efisien.

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2021 dan Tahun 2022

Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan dokumen ke-4 pelaksanaan Rencana Jangka Menengah (RPJM) periode 2020-2024. Pada Tahun 2021 dan 2022, semua target kinerja pada IKK Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dapat tercapai dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	IKK	Satuan	Pengukuran Kinerja 2021			Pengukuran Kinerja 2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	Juta M3	45	47,91	106,46	45	47,78	106,17
2.	UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK	UMKM	200	300	150,00	150	194	129,33
3.	Volume ekspor produk industri kehutanan	Juta Ton	15,5	17,03	109,87	16	15,79	98,69

Untuk tahun 2021, semua IKK yang ditargetkan dapat tercapai sesuai dengan rencana, meskipun pada awal pelaksanaannya dipertimbangkan untuk dilakukan revisi/penyesuaian terhadap target akibat adanya pemotongan anggaran dan pandemic covid-19 yang diperkirakan akan menghambat proses pencapaian target, namun demikian hingga akhir Tahun Anggaran, semua target output dapat tercapai.

Untuk mencapai IKK Tahun Anggaran 2022, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan memiliki target capaian IKK sebagai berikut :

1. Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu dengan target sebesar 45 juta m³;
2. UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK sebanyak 100 UMKM; dan
3. Volume ekspor produk olahan hasil hutan sebesar 16 juta ton.

Dari target tersebut, target IKK 1 dan 2 tercapai diatas ekspektasi, namun untuk IKK 3 "Volume ekspor produk olahan hasil hutan" dari target sebesar 16 juta ton terealisasi 15,79 juta ton atau 98,69%. Meskipun tidak terealisasi 100 % namun capaian tersebut masih sesuai dengan ekspektasi. Belum maksimalnya capaian volume ekspor olahan hasil hutan disebabkan dampak adanya perang Rusia-Ukraina dan inflasi di berbagai negara tujuan ekspor.

Dalam pencapaian targetnya, ke-3 IKK Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, ditunjang dengan 6 Kegiatan utama yang tertuang dalam Rencana Operasional yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan (NSPK) bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- 2) Layanan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan;
- 3) Pembinaan teknis Industri pengolahan hasil hutan;
- 4) Fasilitasi dan pembinaan UMKM kehutanan;
- 5) Layanan Notifikais ekspor dan impor produk hasil hutan;
- 6) Kajian pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan.

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022

Pagu Anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2021 (pagu akhir setelah revisi) adalah sebesar Rp. 12.244.866.000,- dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 12.165.370.953 atau 99,35 % dari PAGU.

Tabel 3. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021

Kode Output	Uraian	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
5401.AFA.001	NSPK Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	352.200.000	299.097.000	297.663.157	99,52
5401.BAC.001	Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	1.600.000.000	1.289.720.000	1.284.310.403	99,58
5401.BDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	12.499.900.000	7.925.555.000	7.886.716.060	99,51
5401.PBV.001	Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	500.000.000	250.990.000	246.707.000	98,29
5401.QAH.001	Layanan Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 6.000 m3/tahun ke atas	900.000.000	646.640.000	644.711.930	99,70
5401.QDB.001	Pembinaan Teknis/Supervisi Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	2.345.240.000	1.832.864.000	1.805.262.403	98,29
Jumlah		18.197.340.000	12.244.866.000	12.165.370.953	99,35

Pada tahun 2021, PAGU awal Anggaran Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan sebesar Rp 18.197.340.000,00 dan selanjutnya dilakukan revisi refocusing anggaran sehingga PAGU pada revisi terakhir pada 2 Agustus 2021 berkurang menjadi sebesar Rp. Rp 12.244.866.000,00. Serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 12.165.370.953,00 atau 99,35 % dari PAGU hasil revisi terakhir.

Dengan capaian kinerja sebesar 108,94%, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,91 (dari perhitungan rasio input dibagi output = $99,35 : 108,94 = 0,91$). Dengan demikian, capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tahun 2021 termasuk kategori efisien (nilai efisiensi <1).

Pada Tahun 2022, PAGU Anggaran Kegiatan Peningkatan Usaha Pengolahan Hasil Hutan sebesar Rp 15.828.316.000 dengan Serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 15.611.015.044 atau 98,63 %.

Tabel 4. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022

Kode Output	Uraian	Pagu	Realisasi	Persen (%)
6733.AFA.001	NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	226.852.000	223.859.309	98,68
6733.BAC.001	Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	5.323.517.000	5.301.080.299	99,58
6733.PBV.001	Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	422.965.000	401.577.500	94,94
6733.QAH.001	Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	570.840.000	569.451.657	99,76
6733.QDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	7.833.816.000	7.669.366.900	97,90
6733.QDB.001	Pembinaan Teknis/Supervisi/Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	1.450.326.000	1445.679.379	99,68
Jumlah		15.828.316.000	15.611.015.044	98,63

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023

A. Strategi dalam mendukung program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) memiliki peran penting untuk mendukung 1 (satu) Kegiatan Prioritas Nasional pada Tahun 2023, yaitu Prioritas Nasional (PN) Nomor 1 “Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”. Ditjen PHL membantu memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi global yang berjalan lambat akibat Pandemi Covid-19, melalui penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor dan penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan pemasaran, perluasan investasi dan efisiensi distribusi dan perdagangan sektor kehutanan.

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, untuk mendukung prioritas nasional tahun 2023 adalah optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pasar, fasilitasi UMKM kehutanan, peningkatan pelayanan perizinan pengolahan hasil hutan, dan pembinaan industri pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Tabel 5. Kegiatan Mendukung Program Prioritas Nasional

PN	PP	KP	Pro PN	Kegiatan	Output	Pagu (Rp) x 1.000
01- Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	06- Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Sektor Riil dan Industrialisasi	01- Peningkatan Industri Berbasis Pertanian, Kemaritiman dan Non Agro yang Terintegrasi hulu-hilir	04- Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	5401- Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	Layanan Perizinan PBPHH Skala Usaha Besar Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan Kinerjanya Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	537.168 1.067.519 348.956 5.757.013 14.489.771

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2023

Dalam mendukung program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan. Kegiatan ini untuk mendukung pencapaian sasaran program “meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu”. Pada Tahun 2023, Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan memperoleh alokasi PAGU Anggaran sebesar Rp. 33.293.388,-. Penilaian keberhasilan kegiatan ini diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan, dengan unit kegiatan dan alokasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6. Indikator Kinerja dan Unit Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan

Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output / Satker	Anggaran (Rp) X 1.000
Volume Produksi Kayu Olahan Yang Bersertifikat Legalitas Kayu (m3)	Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar (Pusat)	537.168
	NSPK Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (Pusat)	223.310
	Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (Pusat)	1.067.519
	Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah (BPHL)	3.764.541
	Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan Kinerjanya (BPHL)	5.757.013
Ekspor produk Industri Hasil Hutan Kayu (Juta Ton)	Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan (Pusat)	7.105.110
	Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu (Pusat)	348.956
UMKM Yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK (Unit UMKM)	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan (Pusat dan BPHL)	Pusat : 5.716.372 Balai : 8.773.399

Dalam rangka mewujudkan tercapainya IKK tersebut, ditetapkan Output kegiatan yang telah disesuaikan dengan arsitektur dan informasi kinerja dan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2023.

Rincian Output dan unit kegiatan tersebut adalah sebagaimana penjelasan berikut :

1. Output NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Alokasi PAGU : Rp. 223.310.000,
Target Output : 1 Rancangan NSPK

Unit kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pembuatan NSPK bidang industri pengolahan dan pemasaran hasil hutan, mulai dari tahap penyusunan sampai dengan konsultasi public dengan tujuan tersedianya NSPK bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan yang selaras dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan kegiatan mempunyai pedoman yang jelas dan dapat berjalan lancar.

Adapun rincian unit kegiatan, indikator unit kegiatan dan elemen kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Unit Kegiatan untuk Output NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
Pembahasan dan Penyusunan NSPK	Tersusunnya rancangan NSPK Bidang Industri PPHH	- Rancangan NSPK	- Pembahasan Rancangan NSPK - Penyusunan NSPK
Konsultasi Publik	Terlaksanannya Konsultasi Publik Rancangan NSPK Industri PPHH	- Laporan Konsultasi Publik Rancangan NSPK	- Konsultasi Publik Rancangan NSPK

2. Output Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan

Alokasi PAGU : Rp. 7.105.110.000
Target Output : 370 Badan Usaha

Unit kegiatan ini dimaksudkan untuk peningkatan volume ekspor produk industri kehutanan melalui pelayanan penerbitan dokumen v-legal, pembinaan kegiatan ekspor dan impor serta pemantauan data ekspor dan impor produk industri kehutanan.

Adapun rincian unit kegiatan, indikator unit kegiatan dan elemen kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Unit Kegiatan untuk Output Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
Pengelolaan Sistem Informasi Legalitas Kayu	Terkelolanya 1 (satu) unit Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) untuk pelayanan dokumen ekspor serta sebagai pusat informasi legalitas kayu	Sistem Informasi Legalitas Kayu (http://silk.menlhk.go.id) beroperasi lancar	- Pemeliharaan Aplikasi SILK - Fasilitasi dan pemantauan data ekspor dan rencana impor

3. Output Fasilitas dan Pembinaan UMKM Kehutanan

Alokasi PAGU Pusat : Rp. 5.716.372.000

Target Output : 25 UMKM

Alokasi PAGU BPHL : Rp. 8.773.399.000

Target Output : 75 UMKM

Unit kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung implementasi pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian dalam memberikan jaminan legalitas kayu yang diperdagangkan di Indonesia serta untuk memfasilitasi sertifikasi legalitas kayu bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Adapun rincian unit kegiatan, indikator unit kegiatan dan elemen kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagaimana pada Tabel 9.

Tabel 9. Unit Kegiatan untuk Output Fasilitas dan Pembinaan UMKM Kehutanan

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
Fasilitasi Sertifikasi/ Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM	Tersedianya data UMKM yang akan difasilitasi Sertifikasi SVLK	- Data UMKM difasilitasi sertifikasi	- Inventarisasi kelompok UMKM yang akan difasilitasi sertifikasi maupun penilikan pertama
Fasilitasi Sertifikasi/ Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM	Terlaksananya kegiatan sertifikasi legalitas kayu (Sertifikasi Pertama pada kelompok UMKM	- Data kelompok UMKM yang difasilitasi SLK dan dilakukan penilikan - Dokumen Kontrak dengan LVLK	- Penilaian dan penilikan kelompok UMKM oleh LVLK
Fasilitasi Pelatihan Auditor/Asesor/ Pendamping SVLK Bagi Eksporir Kecil / UMKM	terlaksananya peningkatan kapasitas pada SDM Pendamping serta LVLK dalam mendukung implementasi SVLK	- Pelaksanaan peningkatan kapasitas LVLK - Pelaksanaan pembekalan bagi pendamping	- Pelatihan dan pembekalan tenaga pendamping dan SDM LVLK
Bimbingan Teknis/Pembinaan UMKM ber-SVLK	Terlaksananya bimbingan teknis kepada kelompok UMKM yang difasilitasi sertifikasi legalitas kayu	- Kesiapan kelompok UMKM dalam pelaksanaan penilaian sertifikasi legalitas kayu oleh LVLK	- Pendampingan ke kelompok UMKM yang difasilitasi sertifikasi legalitas kayu
Supervisi Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian	Terlaksananya Supervisi Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian	- Data Evaluasi implementasi SVLK	- Evaluasi implementasi SVLK - Supervisi Implementasi SVLK
Sosialisasi Peraturan SVLK/Pemberdayaan	terlaksananya Sosialisasi Peraturan	- Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan SVLK	- Sosialisasi Peraturan SVLK

UMKM/Desain Pemasaran/Temu Bisnis	SVLK/Pemberdayaan UMKM/Desain Pemasaran/Temu Bisnis implementasi SVLK	- Desain Pemasaran UMKM - Temu Bisnis UMKM	- FGD Desain Pemasaran UMKM - Forum Temu Bisnis UMKM
Fasilitasi Sistem Legalitas (SVLK) bagi UMKM oleh BPHL	Penilikan Verifikasi Kelestarian bagi UMKM	Terlaksananya Fasilitasi Penilikan SVLK dan Identifikasi UMKM oleh BPHL	- Data UMKM yang difasilitasi Penilikan SLK dan Data hasil inventarisasi rencana fasilitasi UMKM tahun berikutnya - Bombngan Teknis UMKM - Fasilitasi Penilikan SLK untuk UMKM - Identifikasi UMKM calon penerima fasilitasi SLK tahun berikutnya

4. Output Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Produk Olahan Hasil Hutan

Alokasi PAGU : Rp. 348.956.000

Target Output : 1 Dokumen

Unit kegiatan ini dimaksudkan untuk megkaji pelaksanaan pemasaran produk olahan hasil hutan dalam upaya peningkatan ekspor produk industri kehutanan melalui evaluasi kondisi pemasaran hasil hutan, evaluasi hambatan pemasaran dan memberikan rekomendasi perbaikan tatakelola pemasaran produk industri kehutanan.

Adapun rincian unit kegiatan, indikator unit kegiatan dan elemen kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Unit Kegiatan untuk Output Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	Tersedianya rekomendasi untuk pengembangan pasar peoduk industri kehutanan atau perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu	- Data/Informasi kegiatan pemasaran hasil hutan - Data Evaluasi Kebijakan Pemasaran Hasil Hutan - Laporan kegiatan	- Koordinasi dan Pengumpulan Data - Evaluasi Kebijakan dan Penyusunan Kajian - Konsultasi Publik

5. Output Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar

Alokasi PAGU : Rp. 537.168.000,

Target Output : 37 Badan Usaha

Unit kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kelancaran pelayanan izin usaha industri primer hasil hutan, khususnya yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, serta fasilitasi untuk kordinasi/supervisi pelaksanaan layanan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga

pelaksanaan pelayanan perizinan baik yang di pusat maupun yang di daerah dapat terpantau dengan baik dan diperoleh gambaran perkembangan industri primer hasil hutan tingkat nasional.

Adapun rincian unit kegiatan, indikator unit kegiatan dan elemen kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Unit Kegiatan untuk Output Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
Penelaahan/Verifikasi Permohonan Perizinan Usaha Industri Primer Hasil Hutan	Terlayannya permohonan PBPHH skala usaha besar	- Permohonan PBPHH skala usaha besar yang diproses	- Verifikasi Dokumen Perizinan - Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Pasca Perizinan
Koordinasi Pelayanan Perizinan Usaha Industri Primer Hasil Hutan	Terpantaunya Pelayanan Perizinan Industri Pengolahan HH Pusat dan Daerah	- Data dan Informasi Pelayanan Perizinan Industri Pengolahan Hasil Hutan	- Koordinasi Pelayanan Perizinan

6. Output Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Alokasi PAGU : Rp. 1.067.519.000,

Target Output : 150 Badan Usaha

Unit kegiatan ini dimaksudkan agar kegiatan industri pengolahan dan pemasaran hasil hutan berjalan sesuai ketentuan melalui pembinaan/supervisi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada lembaga/pelaku usaha yang terkait dengan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hutan, yaitu pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu, pelaku ekspor / impor produk industri kehutanan serta lembaga sertifikasi legalitas kayu yang berperan sebagai lembaga sertifikasi dan sebagai penerbit dokumen v-legal.

Adapun rincian unit kegiatan, indikator unit kegiatan dan elemen kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Unit Kegiatan untuk Output Pembinaan Teknis/Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
Pembinaan Teknis/ Supervisi bagi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan	Terlaksananya pembinaan kepada Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan	- Data Analisis Kinerja dan Hasil Evaluasi Kinerja PBPHH - Data dan Informasi Pemenuhan Bahan	- Evaluasi Kinerja PBPHH - Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan

Baku dan Produksi Industri Primer HH				
Pembinaan Supervisi Lembaga Legalitas Kayu	Teknis/ bagi Verifikasi Kayu	Terlaksananya bimbingan teknis kepada Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu	- Kesiapan kelompok UMKM dalam pelaksanaan penilaian sertifikasi legalitas kayu oleh LVLK	- Bimbingan Teknis kepada LVLK sebagai Lembaga Sertifikasi - Bimbingan Teknis LVLK sebagai Penerbit Dokumen V-Legal - Evaluasi Penerbitan Dokumen V-Legal
Pembinaan Supervisi Pelaku Produk Kehutanan	Teknis / kepada Ekspor/Impor Industri	Terlaksananya Pembinaan Teknis kepada Pelaku Ekspor / Impor Produk Industri Kehutanan	- Laporan Kegiatan Pembinaan Ekspor/Impor Produk Kehutanan	- Workshop Promosi Produk Industri Kehutanan

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja ini merupakan arahan dan acuan dalam pelaksanaan tugas bagi unit-unit kerja (Bagian) di lingkungan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Setiap Subdirektorat agar segera menyusun langkah-langkah persiapan pelaksanaannya agar Rencana Kerja yang sudah ditetapkan dapat diwujudkan secara optimal melalui perencanaan penganggaran dan perencanaan pengendalian kinerjanya.

Keberhasilan implementasi Rencana Kerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan sangat bergantung pada kesungguhan jajaran Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan serta peran aktif seluruh pegawai dalam mengimplementasikan rencana-rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya hasil pelaksanaan kegiatan diharapkan mampu mendukung pembangunan bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang optimal dapat dirasakan oleh semua pihak.

Lampiran 1 Rancangan Output dan Komponen Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2023

Kegiatan/Output/Sub Ouput/Komponen/Sub Komponen		Volume	Satuan	RM	PNP	Jumlah
5401	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan			17.282.470	16.985.274	34.267.744
AFA	001-NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	1	NSPK	149.052	74.258	223.310
	051 Pembahasan dan Penyusunan NSPK			88.099	34.909	122.918
	052 Konsultasi Publik NSPK			61.043	39.349	100.392
BAC	001-Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	250	Badan Usaha	6.068.437	1.036.673	7.015.110
	051 Pengelolaan Sistem Informasi Legalitas Kayu			6.068.437	1.036.673	7.015.110
BDG	001-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	150	UMKM	6.077.468	8.412.303	14.489.771
	051 Fasilitasi Sertifikan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM			1.149.688	2.874.616	4.024.304
	052 Fasilitasi Pelatihan Auditor/Asesor/Pendamping SVLK Bagi Eksportir Industri Kecil / UMKM			241.796	262.324	504.120
	053 Bimbingan Teknis/Pembinaan UMKM ber-SVLK			222.502	241.393	463.895
	054 Supervisi Impelementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian			173.603	188.338	361.941
	055 Sosialisasi Peraturan SVLK/Pemberdayaan UMKM/Desain Pemasaran/Temu Bisnis			173.684	188.428	362.112
	056 Fasilitasi Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM oleh BPHL *)			4.116.195	4.657.204	8.773.399
PBV	001-Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	1	Dokumen	190.938	158.018	348.956
	051 Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu			190.938	158.018	348.956

QAH	001- Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	37	Layanan	347.347	189.821	537.168
	051 Penelaahan/Verifikasi Permohonan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar			218.961	189.821	338.620
	052 Koordinasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan hasil hutan Skala Besar			128.386	70,162	198.548
QDH	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	150	Badan Usaha	446.441	621.078	1.067.519
	051 Pembinaan Teknis/ Supervisi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan			149.494	426.156	575.650
	052 Pembinaan Teknis/ Supervisi bagi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu			148.409	97.394	245.803
	053 Pembinaan Teknis/ Supervisi bagi Pelaku Ekspor/ Impor Produk Industri Kehutanan			148.538	97.528	246.066
	002-Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah *)	160	Badan Usaha	2.159.028	2.579.869	4.738.897
	051 Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah			1.692.679	2.071.862	3.764.541
	052 Koordinasi Perizinan Berusaha Pengolahan hasil hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah			466.349	508.007	974.356
BIH	001- Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan Kinerjanya *)	150	Badan Usaha	1.843.759	3.913.254	5.757.013
	051 Pemantauan harga pasar produk hasil hutan/ Kinerja Usaha/ Perizinan Berusaha Pengolahan hasil hutan Bersertifikat			1.843.759	3.913.254	5.757.013

*) Kegiatan dilaksanakan oleh Satker BPHL, anggaran berada pada DIPA Satker BPHL (Wilayah I s/d Wilayah XVI)